

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana *Money Politic* oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah Dalam pencegahan money politic di Lampung Tengah, upaya tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki peran dan upaya dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya *money politic* pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan, seperti halnya KPU Kabupaten Lampung Tengah yang juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya money politic.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala KPU Kabupaten Lampung Tengah, terdapat beberapa versi yang berkaitan dengan *money politic* yaitu versi individu, kelembagaan dan juga yang berkaitan dengan pelanggarannya. Adapun yang terdapat di KPU berkaitan dengan individu, baik itu individu fungsionaris KPU yang ditawarkan atau diiming-imingi sejumlah uang oleh misalkan salah satu pasangan calon, akan tetapi KPU Lampung Tengah tetap berkomitmen untuk selalu menjaga integritas sebagai komisi pemilihan umum, dan KPU Lampung Tengah tidak akan pernah melayani Money Politik dalam bentuk apapun dan juga akan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tertulis dalam undang-undang 1945. Dari hasil wawancara ini, juga dapat dilihat bahwa potensi money politic dapat terjadi dimana saja. Akan tetapi, dengan integritas tinggi yang dimiliki oleh segenap fungsionaris KPU Kabupaten Lampung Tengah, dapat mencegah terjadinya potensi tersebut, sehingga tidak masuk ke wilayah kerja KPU Kabupaten Lampung Tengah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana *Money Politic* oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah Banyaknya pengangguran yang terjadi dan Ekonomi yang lemah salah satu yang menjadi pendorongan bagi masyarakat yang menerima money politics maka dari itu untuk mencegah terjadinya money politic sangat sulit, dalam setiap pemilihan umum dan belum ada yang dapat membuktikannya, Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Irawan Indra Jaya:

“Menurut bapak Irawan Indra Jaya sudah menjadi tradisi politik uang dalam setiap ada pemilihan karena sulit sekali untuk dicegah supaya tidak terjadi kegiatan money politik,

karena menurut informan sekarang politik sudah tidak sehat lagi dikarenakan sekarang yang seharusnya berkualitas dikalahkan oleh yang beruang, menurutnya cara mencegahnya Undang- Undang harus diperkuat memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar , sedangkan faktor pendukungnya karena faktor ekonomi, sudah menjadi tradisi, kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat, informan juga berpesan kepada Bawaslu supaya melakukan pengawasan yang tegas yang dilakukan para calon yang melanggar tanpa pandang bulu, sebab selama ini belum dapat di pecahkan oleh penyelenggara pemilu supaya tercapainya pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa”

Berdasarkan hasil temuan Bawaslu, faktor penghambat disebabkan karena rendahnya pemahaman akan pentingnya masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu (control of social) belum terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya laporan pelanggaran dari masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan laporan dugaan pelanggaran tidak optimal dan cenderung statis. Adapun faktor lain yaitu faktor keragaman pemilih. Secara sosial, masyarakat dalam memilih pilihannya saat pemilu dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Jika di tarik kedalam konteks *money politic*, maka latar belakang tersebut sangat mempengaruhi sikap permisif masyarakat terhadap *money politic*.

Dalam kesempatan mewawancarai Bapak Yuli dalam wawancara tersebut beliau menyatakan sebagai berikut:

“... untuk menekan terjadinya money politic, tergantung di masyarakat, jika suatu masyarakat memiliki karakter, berpendidikan tinggi, akan cenderung kurang potensi terjadinya money politic, namun jika suatu masyarakat secara ekonomi menengah kebawah, disitulah money politic dapat berpengaruh sangat kuat terhadap pilihan masyarakat.”

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis dapat jelaskan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya KPU dan Bawaslu terus meningkatkan kinerja dalam mencegah politik uang melalui sosialisasi secara masif baik melalui media massa maupun poster-poster ke

khalayak umum agar pesan dari kampanye “Tolak Politik Uang” dapat tersampaikan dengan baik.

2. Sebaiknya pihak KPU dan Bawaslu lebih berinisiatif untuk menambah SDM sendiri jika memang sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan bawaslu menjadi lebih baik, mengingat belum adanya tanggapan dari pihak KPU dan Bawaslu pusat terkait permintaan penambahan SDM.